

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana strategi gerakan politik Partai Hijau Indonesia PHI dalam memperjuangkan keadilan ekologis atas deforestasi akibat ekspansi kebun kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam Bab IV, dapat disimpulkan bahwa strategi gerakan politik hijau PHI tidak dapat dipahami sebagai upaya elektoral semata, melainkan sebagai praktik politik yang bekerja di tengah keterbatasan struktural sistem politik Indonesia yang cenderung memihak kepentingan ekonomi ekstraktif.

Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa efektivitas PHI dalam memperjuangkan keadilan ekologis tidak terletak pada capaian kebijakan formal atau keberhasilan elektoral jangka pendek, melainkan pada kemampuannya mempertahankan konflik ekologis sebagai konflik politik yang sah, terbuka, dan terus diproduksi di ruang publik. Dalam konteks deforestasi sawit, PHI berfungsi sebagai aktor politik yang menolak normalisasi kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi pembangunan, serta menantang depolitisasi isu ekologis melalui mekanisme administratif negara.

Pertama, dari sisi pembentukan identitas kolektif, PHI berhasil memosisikan diri sebagai representasi politik dari kesadaran ekologis yang lahir dari pengalaman panjang gerakan masyarakat sipil. Identitas politik hijau yang dibangun PHI relatif konsisten dalam dokumen ideologis, pernyataan elite, jejaring advokasi, dan praktik komunikasi politik. Identitas ini membedakan PHI dari partai politik arus utama yang cenderung pragmatis dan transaksional. Namun, identitas tersebut masih terkonsentrasi pada segmen sosial tertentu dan belum terdistribusi secara luas di basis pemilih yang bergantung pada ekonomi sawit.

Kedua, dari sisi produksi makna sosial, PHI menunjukkan kapasitas yang kuat dalam membingkai deforestasi sawit sebagai persoalan ketimpangan struktural antara negara, korporasi, dan masyarakat terdampak. Melalui editorial, liputan konflik wilayah, solidaritas atas bencana ekologis, serta advokasi transnasional, PHI secara konsisten menolak bahasa pembangunan teknokratis dan

menggantikannya dengan narasi keadilan ekologis. Produksi makna ini efektif dalam menjaga dimensi politis isu lingkungan, meskipun jangkauannya masih dibatasi oleh dominasi media arus utama dan kekuatan wacana industri.

Ketiga, strategi advokasi non elektoral PHI terbukti menjadi fondasi utama gerakan politik hijau yang dijelankannya. PHI memanfaatkan ruang di luar institusi formal untuk membangun kesadaran, legitimasi moral, dan konsistensi posisi politik. Dalam isu sawit, advokasi non elektoral memungkinkan PHI menghubungkan kasus kasus konkret di tingkat lokal dengan kritik struktural terhadap kebijakan nasional. Strategi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan akses ke kekuasaan formal tidak menghentikan kerja politik PHI, tetapi justru membentuk pilihan strategis yang lebih reflektif dan jangka panjang.

Keempat, relasi PHI dengan LSM dan komunitas lingkungan menunjukkan pola jejaring yang bersifat negosiasi dan kondisional. Di tingkat nasional, jejaring dengan LSM berfungsi sebagai upaya menerjemahkan kegagalan advokasi nonpartisan ke dalam kanal politik formal. Di tingkat wilayah, relasi dengan komunitas terdampak sawit memperlihatkan upaya PHI menjembatani tuntutan lokal ke arena kebijakan. Namun, jejaring ini juga menghadapi batas struktural, terutama kekhawatiran akan kooptasi politik dan keterbatasan kapasitas PHI untuk memenuhi ekspektasi perubahan struktural.

Kelima, keterbatasan akses PHI terhadap kekuasaan formal merupakan temuan penting yang tidak dapat diabaikan. Hambatan institusional seperti ambang parlemen, biaya politik tinggi, dominasi oligarki, dan de ideologisasi sistem kepartaian membatasi peluang PHI untuk mempengaruhi kebijakan secara langsung. Namun, dalam perspektif gerakan sosial baru, keterbatasan ini tidak dapat langsung disimpulkan sebagai kegagalan. Sebaliknya, kondisi tersebut menegaskan bahwa struktur politik Indonesia masih resisten terhadap agenda ekologis yang menantang logika pembangunan ekstraktif.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi gerakan politik PHI dalam memperjuangkan keadilan ekologis atas deforestasi sawit bersifat efektif secara simbolik, kultural, dan jaringan, tetapi belum efektif secara institusional. Efektivitas PHI terletak pada kemampuannya menjaga konflik ekologis tetap hidup sebagai konflik politik nilai, bukan pada kemampuannya

menghasilkan perubahan kebijakan cepat. Posisi ini menempatkan PHI sebagai aktor kontra hegemonik yang penting dalam lanskap politik Indonesia, sekaligus mengungkap batas nyata dari politik hijau dalam sistem yang masih didominasi kepentingan ekstraktif.

Kesimpulan ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian dengan menunjukkan bahwa perjuangan keadilan ekologis melalui politik hijau bukanlah jalan singkat menuju perubahan kebijakan, melainkan proses panjang yang menuntut konsistensi identitas, produksi makna alternatif, jejaring sosial yang kuat, serta kesadaran penuh akan hambatan struktural yang dihadapi.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam Bab IV, penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan Partai Hijau Indonesia memiliki signifikansi penting dalam membangun kesadaran ekologis dan memperluas wacana politik hijau di Indonesia. Meskipun menghadapi keterbatasan struktural yang kuat, PHI telah berperan sebagai aktor gerakan sosial yang konsisten dalam memperjuangkan nilai keadilan ekologis. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan saran yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu saran praktis dan saran teoretis, yang ditujukan untuk memperkuat perjuangan politik hijau sekaligus pengembangan kajian akademik di bidang ini.

5.2.1 Saran Praktis

Penguatan infrastruktur gerakan politik hijau perlu menjadi prioritas utama bagi PHI. Sebagai gerakan sosial yang bertransformasi ke dalam arena politik formal, PHI disarankan untuk terus memperkuat konsolidasi internal, jejaring lintas organisasi masyarakat sipil, serta hubungan dengan komunitas adat dan kelompok terdampak deforestasi. Penguatan ini penting agar nilai-nilai ekologis yang diperjuangkan tidak terfragmentasi dan tetap terjaga sebagai identitas kolektif gerakan.

Selain itu, PHI perlu memperluas pendidikan politik ekologis berbasis komunitas sebagai strategi jangka panjang membangun kesadaran sosial. Pendidikan politik yang menekankan relasi antara krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan struktur kekuasaan dapat memperkuat basis dukungan publik yang tidak bersifat transaksional. Pendekatan ini sejalan

dengan karakter gerakan sosial baru yang menempatkan perubahan kesadaran sebagai prasyarat perubahan struktural.

PHI juga disarankan untuk mempertahankan independensi politiknya dari kepentingan modal besar dengan terus mengembangkan model partisipasi berbasis solidaritas, relawan, dan jejaring sosial. Meskipun strategi ini membatasi kemampuan elektoral jangka pendek, ia berperan penting dalam menjaga integritas nilai dan legitimasi moral gerakan di tengah sistem politik yang pragmatis.

5.2.2 Saran Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan kajian mengenai politik hijau dan gerakan sosial di Indonesia dengan menggunakan Teori Gerakan Sosial Baru sebagai kerangka analisis utama. Penelitian lanjutan dapat mengkaji secara komparatif gerakan politik hijau di negara-negara dengan struktur politik oligarkis untuk melihat variasi strategi, hambatan, dan bentuk keberhasilan gerakan sosial berbasis nilai.

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melakukan studi longitudinal terhadap perkembangan Partai Hijau Indonesia dan gerakan lingkungan lainnya guna mengamati perubahan identitas kolektif, produksi makna ekologis, serta relasinya dengan transformasi kebijakan publik dalam jangka panjang. Pendekatan ini penting untuk memahami dinamika gerakan sosial baru sebagai proses historis, bukan fenomena elektoral sesaat.

Akhirnya, kajian akademik di masa mendatang dapat memperdalam analisis mengenai relasi antara negara, gerakan sosial, dan dominasi ekonomi dalam konteks krisis ekologis. Pendalaman ini akan memperkaya diskursus sosiologi politik dan studi lingkungan, sekaligus menegaskan relevansi Teori Gerakan Sosial Baru Alain Touraine dalam membaca perjuangan politik ekologis di Indonesia.